



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAGETAN**

TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318

Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222

Website : <http://dpmpstsp.magetan.go.id> Email : dpmpstsp@magetan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : 188/ 18 /Kept/403.117/2022

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 08).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Kesatu : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pemina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Magetan, 15 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan antar dokumen	3
1.4. Maksud dan Tujuan	5
1.5. Sistematika Perubahan Renja SKPD	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	8
2.1. Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II	8
2.2. Telaah terhadap hasil pelaksanaan renja tahun berjalan	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	10
3.1. Tujuan dan Sasaran	10
3.2. Reviu Terhadap dokumen Perubahan RKPD	10
3.3. Rencana Program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah	22
BAB IV. PENUTUP	23

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu

kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional, provinsi dan Kabupaten

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan

perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat

Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 356 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan didasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya tahun berjalan, dimana menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Renja Perubahan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan kondisi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan tribulan II, dimana dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya beberapa kebutuhan yang diperlukan sehingga diperlukan usulan perubahan anggaran baik penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan, penyesuaian target sasaran atau target kinerja. Selain itu terdapat perubahan asumsi ekonomi daerah (kerangka pendanaan daerah), adanya perubahan RKPD, Penyesuaian belanja wajib mengikat dan penyesuaian dan pergeseran pagu anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

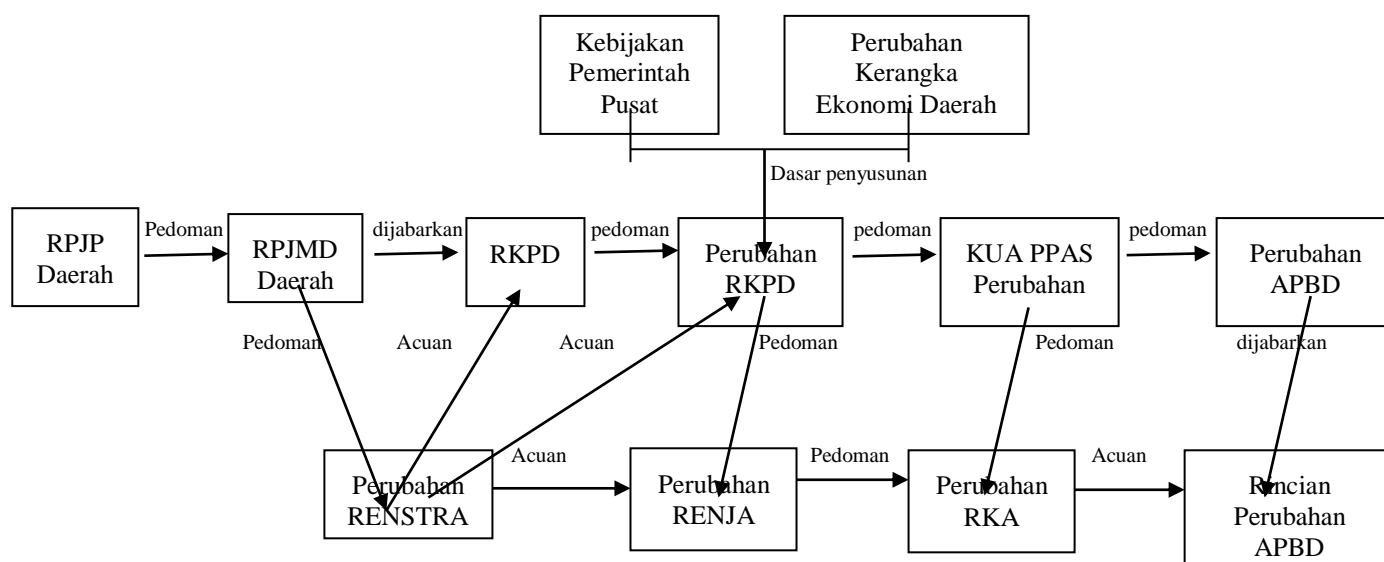
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75).
26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 32);
27. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 08).
28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 34).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja DPMPSTP Kabupaten Magetan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Renja disebabkan karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN
MAGETAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
LAINNYA



Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Perubahan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan disusun dengan berpedoman pada RKPD Perubahan dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja;
- c. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan disusun dengan memperhatikan dan mengacu perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja;
- d. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran;
- e. Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2020 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta

pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2022 yaitu :

1. Menyediakan acuan dan panduan dalam menentukan prioritas, program dan kegiatan Tahun 2022;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dan acuan evaluasi tahun 2022;
3. Memberikan gambaran kondisi umum Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Magetan;
4. Memudahkan seluruh jajaran DPMPTSP Kabupaten Magetan untuk mengetahui arah kebijakan dan program serta kegiatan tahun 2022.

1.5. Sistematika Perubahan Renja SKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang : Dasar pertimbangan perlu dilakukan perubahan Renja PD yang disertai dengan gambaran tentang Perubahan kerangka pendanaan Perangkat Daerah.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan : Uraian ringkas dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan perubahan Renja PD , baik yang berskala nasional maupun lokal
- 1.3 Hubungan antar dokumen : Hubungan Perubahan Renja PD dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan RKPD, KUPA dan PPAS perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya)
- 1.4 Maksud dan Tujuan : Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan

Renja PD

- 1.5 Sistematika Penulisan : Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan perubahan renja PD

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II : Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan sampai dengan tribulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan target Renstra PD)
- 2.2 Telaah terhadap hasil pelaksanaan renja tahun berjalan : Memuat penjelasan pelaksanaan Renja PD tahun berjalan (progres permasalahan dan soluso yang diambil)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran : Memuat tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Juga memuat target capain IKU dan IKD sesuai tusi kewenangan PD setara dengan target d RPJMD dan P-RKPD
- 3.2 Reviu Terhadap dokumen Perubahan RKPD : Membandikan antara P-RKPD dengan hasil analisis kebutuhan P Renja PD terkait target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran yang terdapat pada masing masing program kegiatan/ sub kegiatan
- 3.3 Rencana Program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah : Memuat Pergeseran / perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan tribulan II

Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022. berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam periode tertentu.

Pada tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Magetan melaksanakan 6 (enam) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluhan) sub Kegiatan. Berikut adalah capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

2.2 Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra, akan diketahui realisasi program atau kegiatan baik yang memenuhi target kinerja yang direncanakan maupun yang tidak memenuhi target kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengukur sampai dimana keberhasilan kinerja OPD berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja dan pencapaian anggaran menunjukkan bahwa sampai dengan tribulan kedua penggunaan anggaran yang efisien, efektifitasnya masih belum terlihat pada capaian nilai investasi sebagai kinerja DPMPTSP yang terealisasi sampai dengan tribulan II. Dinas Penanaman Modal dalam mendorong investor melakukan LKPM dan memberikan iklim penanaman modal yang kondusif serta dalam hal urusan PTSP perlu mengoptimalkan promosi potensi dan peluang investasi, proses pelayanan terpadu Mal Pelayanan Publik baik melalui OSS ataupun aplikasi SIMPADU, Perlu meningkatkan sarana dan prarana di lantai 3 Mal Pelayanan Publik dan Perlu pengembangan atau pengintegrasian aplikasi . Dengan demikian beberapa program yang akan menjadi konsentrasi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Program Promosi Penanaman Modal
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

B A B III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Dan Sasaran

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tujuan Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan Investasi Daerah

Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Sasaran Target Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4
1.	Meningkatny a nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi.	Nilai Realisasi Investasi > Target
		b. Jumlah investor	Jumlah Investor > Target
2.	Meningkatny a kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai SKM > Target
		b. Prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Terselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$

3.2. Reviu terhadap Dokumen Perubahan RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada DPMPTSP Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022
Kabupaten Magetan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rencana P RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan P. Renja					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Evaluasi Kinerja . Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	20.000.000	b Evaluasi Kinerja . Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	20.000.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen gaji Pegawai	12 Bulan	3.036.226.238	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen gaji Pegawai	12 Bulan	3.036.226.238	

		n									
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	peserta bimbingan teknis	48 orang	36.500.000	b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta bimbingan teknis	47 orang	36.500.000	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	20.000.000	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	20.000.000	
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	245.000.000	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	umlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan	245.000.000	

							Kantor					
c	Penyediaan . Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan, Magetan, Semua Keluraha n	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	30.000.000	c	Penyediaan . Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	30.000.000	
d	Penyediaan . Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Keluraha n	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	75.000.000	d	Penyediaan . Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaa n Bahan Logistik KantorJu mlah Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	12 bulan	75.000.000	
e	Penyediaan . Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Keluraha n	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda n	12 bulan	10.000.000	e	Penyediaan . Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan	12 bulan	10.000.000	
f	Penyediaan . Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Keluraha n	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 bulan	10.000.000	f	Penyediaan . Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g - Undangan	12 bulan	10.000.000	

	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas	12 bulan	90.000.000	g Penyelenggaraan . Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas	12 bulan	90.000.000	
1.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a	Penyediaan Jasa . Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi , Sumber daya air dan Listrik	12 bulan	165.000.000	a Penyediaan Jasa . Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 bulan	165.000.000	
	b	Penyediaan Jasa . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	50.000.000	b Penyediaan Jasa . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	50.000.000	
	c	Penyediaan Jasa . Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	525.000.000	c Penyediaan Jasa . Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	525.000.000	
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					

	Pemerintahan Daerah						Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
	a . Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	72.656.000		a Penyediaan Jasa . Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	72.656.000	
	b . Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	1 gedung	150.000.000		b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	2 gedung	150.000.000	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					

2.1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penetapan . Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kajian Penanaman Modal	1 dokumen	50.000.000	a Penetapan . Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kajian Penanaman Modal	1 dokumen	50.000.000	
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi yang disusun	1 Dokumen	115.000.000	b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi yang disusun	1 Dokumen	115.000.000	
3	Program Promosi Penanaman Modal					Program Promosi Penanaman Modal					

3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Pelaksanaan . Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Pameran Investasi dan Publikasi	4 kali	310.000.000	a Pelaksanaan . Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah pameran investasi	4 kali	310.000.000	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal					Program Pelayanan Penanaman Modal					
4.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

	a	Penyediaan . Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	4000 Dokumen	145.000.000	a	Penyediaan . Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	4000 Dokumen	145.000.000	
	b	Pemantauan . Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	24 Dokumen	20.000.000	b	Pemantauan . Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	24 Dokumen	20.000.000	
	c	Koordinasi dan . Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota Forum Komunikasi PTSP	50 orang	25.000.000	c	Koordinasi dan . Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota Forum Komunikasi PTSP	50 orang	25.000.000	
5		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
5.1		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						

	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Rakor	234 orang	369.573.400	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Rakor	234 orang	369.573.400	
	b Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengendalian Penanaman Modal	12 dokumen	25.121.600	b Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengendalian Penanaman Modal	12 dokumen	25.121.600	
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

	a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem informasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	50.000.000	a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem informasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	50.000.000	
TOTAL					5.645.077.238	TOTAL					5.645.077.238

3.3 Rencana Program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sesuai dengan usulan Perubahan Program Kegiatan Tahun 2022 pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.1.

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Target		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2181		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										5,262,656,228	5,645,077,238				4,907,888,041	
2181		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,257,961,228	4,535,382,238				3,957,888,041	
2181	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										10,000,000	20,000,000				60,000,000	
2181	2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan pelaporan kinerja dan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	5 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	40,000,000
2181	2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan pelaporan kinerja dan keuangan	Kab. Magetan, Magetan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	1 dokumen	1 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	10,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	20,000,000
2181	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,078,721,228	3,036,226,238				1,934,188,041	
2181	2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyusunan laporan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	3,078,721,228	3,036,226,238	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	1,904,188,041
2181	2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan yang disusun.	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	30,000,000
2181	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										25,000,000	36,500,000				55,000,000	
2181	2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	jumlah pakaian dinas hasil pengadaan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Skor	82 Skor	5 stell	5 stell	40 Orang	40 Orang	200,000	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	0
2181	2.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan teknis	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Skor	82 Skor	40 orang	40 orang	40 Orang	40 Orang	24,800,000	36,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Skor	55,000,000
2181	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										361,000,000	480,000,000				700,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
218102001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	25,000,000	
218102002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	150,993,077	245,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	400,000,000	
218102003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	40,000,000	
218102004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	65,006,923	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	70,000,000	
218102005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	50,000,000	
218102006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	10,000,000	
218102009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	Jumlah Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	105,000,000	
218102008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											668,240,000	740,000,000				825,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
21081200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	175,000,000	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	210,000,000	
21081300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	80,000,000	
21081400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	448,240,000	525,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	535,000,000	
2108109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											115,000,000	222,656,000			383,700,000		
2108192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	65,000,000	72,656,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	85,000,000	
2108199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 skor	82 skor	1 gedung	1 gedung	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 skor	298,700,000	
21082	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											105,000,000	165,000,000			0		
2108201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											50,000,000	50,000,000			0		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210202011	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	Jumlah dokumen kajian penanaman modal	Jumlah Dokumen Penetapan pemberian fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 persen	77 persen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	77 persen	0	
21020202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											55,000,000	115,000,000			0		
21020202	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	Jumlah peta potensi investasi yang disusun.	Jumlah Peta Potensi yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 persen	77 persen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	55,000,000	115,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	77 persen	0	
210203	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											310,000,000	310,000,000			550,000,000		
21020301	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											310,000,000	310,000,000			550,000,000		
21020302	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan potensi yang dipromosikan	Jumlah pameran investasi Jumlah publikasi dan sosialisasi	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 persen	88 persen	4 kali 2 Paket Publikasi	4 kali 2 Paket Publikasi	8 dokumen	8 dokumen	310,000,000	310,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Cakupan potensi yang dipromosikan	88 persen	550,000,000	
210204	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											120,000,000	184,000,000			150,000,000		
21020401	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											120,000,000	184,000,000			150,000,000		
210204011	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	Jumlah Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4000 dokumen 1 Kegiatan	4000 dokumen 1 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	95,000,000	139,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100 persen	115,000,000	
210204012	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan.	Jumlah Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	24 dokumen	24 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100 persen	20,000,000	
210204014	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP	Jumlah Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	10 orang	10 orang	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	25,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100 persen	15,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													419,695,000	394,695,000			200,000,000
218501	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													419,695,000	394,695,000			200,000,000
218511	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	12 dokumen	0 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	97,056,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	80 persen	20,000,000	
218512	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	Jumlah peserta rakor	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	10 orang	234 orang	12 Dokumen	12 Dokumen	205,482,000	369,573,400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	80 persen	160,000,000	
218513	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	12 dokumen	15 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	117,157,000	25,121,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	80 persen	20,000,000	
2186	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL													50,000,000	56,000,000			50,000,000
218601	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													50,000,000	56,000,000			50,000,000
218611	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase data dan informasi yang dikembangkan	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	50,000,000	56,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase data dan informasi yang dikembangkan	90 persen	50,000,000	
TOTAL												5,262,656,228	5,645,077,238				4,907,888,041	

B A B V

P E N U T U P


Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2022. Dengan Perubahan Rencana Kerja ini, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih baik, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Magetan, 15 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001